Krepa: Kreativitas Pada Abdimas
ISSN 2988-3059
Cahaya Ilmu Bangsa

Vol 5 No 5 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.9765/Krepa.V218.3784

Peran Rumah Perlindungan Sosial Kota Medan sebagai Instrumen Kebijakan Publik untuk Pengurangan Ketimpangan Sosial di Perkotaan

Wahyu Mei Lani[1], Fajar Utama Ritonga[2], Agus Suriadi[3]
Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara
Kota Medan, Indonesia
Email : wahyumei@students.usu.ac.id[1]
fajar.utama@usu.ac.id[2]
agus4@usu.ac.id[3]

ABSTRAK

Ketimpangan sosial di wilayah perkotaan merupakan tantangan serius dalam pembangunan yang berkeadilan dan inklusif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Rumah Perlindungan Sosial (RPS) Kota Medan sebagai bagian dari instrumen kebijakan publik dalam upaya mengurangi ketimpangan sosial. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RPS Kota Medan tidak hanya berfungsi sebagai tempat penampungan sementara bagi kelompok rentan seperti tunawisma, korban kekerasan, dan lansia terlantar, tetapi juga memainkan peran strategis dalam pemulihan sosial, reintegrasi, serta pemberdayaan ekonomi dan psikososial. Program-program yang dijalankan RPS, jika didukung secara konsisten oleh pemerintah daerah dan melibatkan kolaborasi multisektor, terbukti mampu memberikan dampak signifikan terhadap penurunan ketimpangan sosial dan peningkatan kualitas hidup kelompok marjinal. Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi RPS dalam kerangka kebijakan publik perkotaan sebagai upaya konkret untuk mewujudkan keadilan sosial.

Kata kunci: Rumah Perlindungan Sosial, ketimpangan sosial, kebijakan publik, Kota Medan, keadilan sosial

ABSTRACT

Social inequality in urban areas remains a critical challenge to achieving equitable and inclusive development. This study aims to analyze the role of the Social Protection House (Rumah Perlindungan Sosial, RPS) in Medan City as part of public policy instruments in addressing social inequality. A descriptive qualitative approach was employed, utilizing in-depth interviews, field observations, and document analysis as data collection techniques. The findings reveal that the RPS in Medan functions not only as a temporary shelter for vulnerable

Article History
Received: Juni 2025
Reviewed: Juni 2025
Published: Juni 2025

Plagirism Checker No 234.KK.443
Prefix DOI : **10.9765/Krepa.V218.3784**
Plagirism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/Krepa.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : Krepa

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Krepa: Kreativitas Pada Abdimas
ISSN 2988-3059
Cahaya Ilmu Bangsa
Vol 5 No 5 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.9765/Krepa.V218.3784

groups—such as the homeless, victims of violence, and neglected elderly—but also plays a strategic role in social recovery, reintegration, and the economic and psychosocial empowerment of marginalized individuals. The programs implemented by the RPS, when consistently supported by local government and strengthened through multisectoral collaboration, demonstrate a significant impact on reducing social disparities and improving the quality of life for marginalized communities. These findings underscore the importance of integrating the RPS within the broader framework of urban public policy as a concrete effort toward achieving social justice.
***Keywords**: Social Protection House, social inequality, public policy, Medan City, social justice*

PENDAHULUAN

Peran Rumah Perlindungan Sosial di Kota Medan sebagai instrumen kebijakan publik untuk mengurangi ketimpangan sosial di perkotaan. Ketimpangan sosial merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh banyak kota di negara berkembang, termasuk Medan. Ketimpangan ini diperburuk oleh krisis global yang berdampak pada peningkatan kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi, serta perubahan dalam struktur sosial masyarakat (Humaizi dkk, 2024).

Rumah Perlindungan Sosial di Medan berfungsi sebagai bagian dari upaya pemerintah kota untuk mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan, tunawisma, dan pengemis. Program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi bagi individu yang membutuhkan, serta mengurangi jumlah tunawisma dan pengemis melalui penyediaan rumah singgah (Siregar dkk, 2024). Namun, efektivitas program ini masih perlu ditingkatkan, mengingat keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan koordinasi antar lembaga (Sudiarti dkk, 2022).

Desentralisasi kebijakan publik di Indonesia memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk merancang dan melaksanakan program yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Di Medan, kebijakan desentralisasi ini telah mempengaruhi pelaksanaan program-program sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial melalui bantuan sosial bersyarat. Namun, efektivitas kebijakan ini masih memerlukan kajian lebih lanjut untuk memahami dampaknya secara spesifik terhadap masyarakat Medan (Tampubolon dkk, 2024).

Ketimpangan sosial di Medan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat pengangguran yang tinggi, akses terbatas terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta masalah sosial seperti kekerasan dalam keluarga (Benediktus dkk 2022). Kondisi ini menambah kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh Rumah Perlindungan Sosial dalam menjalankan fungsinya sebagai instrumen kebijakan publik.

Pemerintah Kota Medan telah mengadopsi kebijakan desentralisasi yang memungkinkan pengembangan program-program sosial yang lebih terfokus dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun, tantangan dalam tata kelola kota, termasuk korupsi, masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan yang efektif (Tarigan dkk, 2017). Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan koordinasi dan sinergi antara berbagai lembaga terkait untuk mengoptimalkan fungsi Rumah Perlindungan Sosial.

Krepa: Kreativitas Pada Abdimas
ISSN 2988-3059
Cahaya Ilmu Bangsa
Vol 5 No 5 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.9765/Krepa.V218.3784

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi multisektor dan pemberdayaan komunitas sebagai strategi untuk mengatasi ketimpangan sosial di Medan. Pendekatan ini dapat membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan esensial dan peluang ekonomi, serta memperkuat kapasitas komunitas dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi (Humaizi dkk, 2024).

Dengan memahami peran dan tantangan yang dihadapi oleh Rumah Perlindungan Sosial di Medan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan model intervensi yang lebih holistik dan evaluasi dampak jangka panjang dari kebijakan yang diterapkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan publik yang diimplementasikan dapat secara efektif mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perkotaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, untuk mengungkapkan suatu masalah atau keadaan serta peristiwa sebagaimana adanya dan mengamati permasalahan secara mendalam. Kemudia data dikumpulkan dengan menggunakan teknik-teknik pengumpualan data yang tepat. Untuk itu dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik atau metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan, Analisis data penelitian ini dilakukan dengan empat jalur yang bersamaan yaitu: Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi (Milles dan Huberman 1992).

TEMPAT DAN WAKTU

Pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

Tempat : Rumah Perlindungan Sosial
Waktu Pelaksanaan Kegiatan : 03 Maret s/d 20 Juni 2025

METODE KEGIATAN

Metode pelaksanaan kegiatan akan disajikan melalui penjelasan dibawah ini :

1. **Survei Tempat Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menggali informasi tentang kondisi geografis dan kondisi masyarakat didaerah tempat kegiatan.Informasi tersebut berupa lokasi, permasalahan yang dihadapi dalam pada lokasi tersebut.

2. **Persiapan Sarana dan Prasarana**

Kegiatan ini dimaksudkan untuk merencanakan kebutuhan baik sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan dengan tetap memperhatikan kebutuhan Rumah Perlindungan Sosial demi tercapainya target pengabdian kepada masyarakat.

3. **Pelaksanaan Kegiatan**

Setelah melakukan survey dan persiapan sarana dan prasarana maka pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh pengusul beserta anggota dan beberapa mahasiswa. Kegiatan yang dilakukan adalah berupa penyuluhan dalam bentuk pertemuan secara langsung yang bertempat Rumah Perlindungan Sosial selama kurang lebih 3 bulan terhitung dari bulan Maret sampai Juni

Krepa: Kreativitas Pada Abdimas
ISSN 2988-3059
Cahaya Ilmu Bangsa
Vol 5 No 5 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.9765/Krepa.V218.3784

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam langkah mengembalikan keberfungsian sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), pekerja sosial dapat menggunakan Tools Assesment Pekerjaan Sosial. Tools Assesment Pekerja Sosial meliputi :

1. Genogram Adalah sebuah diagram seperti sebuahpohon keluarga. Genogram dapat menggambarkan hubungan keluarga untuk dua atau tiga generasi (untuk menggambarkan lebih dari tiga generasi akan menjadi sangat komplek). Beberapa informasi yang termasuk di dalam genogram ini antara lain adalah : umur, jeniskelamin, status perkawinan dan komposisi keluarga, struktur keluarga dan hubungan keluarga (misalnya anak kandung, anak angkat, orangtua dan sebagainya); Situasi pekerjaan dan tanggung jawab, kegiatan sosial dan minat/bakat; dam karakter yang mengikuti anggota keluarga yang bersangkutan. Berikut adalah contoh genogram pada wawancara awal.
2. Ecomap Adalah gambaran seseorang atau suatu keluarga di dalam suaru konteks sosial. Informasi yang termasuk di dalamnya antara lain adalah : keluarga inti, asosiasi formal (misalnya keanggotaan dalam aktivitas keagamaan, partisipasi dalam organisasi dan sebagainya). Sumber-sumber yang mendukung atau bahkan membuat stress dalam interaksi sosial (antara seseorang dengan sistem komunitasnya); penggunaan sumber-sumber yang terdapat di lingkungan serta sumber-sumber yangt erdapat di lingkungan serta sumber-sumber informal dan lingkungan pendukung (keluarga besar, kerabat, teman, tetangga dan kelompok bantu diri).
3. Social Life Road Menggambarkan tentang perjalanan hidup seseorang di mana pada garis gelombang bagian atas menjelaskan tentang hal-hal yang baik atau yang disenangi, sedangkan bagian bawah menjelaskan tentang hal-hal yang kurang disenangi dalam perjalanan hidup atau dari masa lalu.
4. Kuadran Strenght Adalah salahsatu alat asesmen untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan baik dalam diri klien maupun dalam hubungannya dengan orang lain atau lingkungan sosialnya yang ada pada diri klien atau penerima manfaat.
5. Diagram Venn Dapat diartikan sebagai sebuah diagram yang didalamnya terdapat seluruh kemungkinan hubungan logika serta hipotesis dari sebuah himpunan benda ataupun objek. Berikut adalah contoh dari gambar diagram venn. Sebuah diagram venn terdiri dari beberapa unsur. Seperti dapat kalian amati apada gambar di atas, bagian persegi panjang yang ada di bagian luar merupakan bagian persegi panjang yang ada di bagian luar merupakan bagian yang disebut sebagai himpunan semesta. Sementara lingkaran yang ada di dalam persegi tersebut menyatakan himpunan dengan titik-titikyang menjelaskan tiap-tiap anggota dari himpunanan tersebut. Agar kalian lebih mudah dalam memahaminya.
6. Road Map Menurut arti kamus, roadmap atau peta jalan adalah rencana kerja yang menggambarkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan.Roadmap umumnya disusun sebagai bagian dari rencana strategis. Substansi penlisannya :

a.Keadaan saat ini (sebagai baseline)
b.Tujuan yang ingin dicapai
c.Uraian tahap pelaksanaan untuk mencapai tujuan
d.Sasaran dari setiap tahapan.
e. Indikator pencapaian sasaran

Roadmap dapat diterapkan untuk berbagai domain persoalan, seperti ekonomi, kesehatan, transportasi, reformasi birokrasi, teknologi informasi dan lain sebagainya.

Disini Peneliti menggunakan Tools Social Life Road.dimana klien menceritakan kejadian selama 5 tahun terkhir kepada pekerja sosial.

Penerapan Metode Praktik Pekerja Sosial

Krepa: Kreativitas Pada Abdimas
ISSN 2988-3059
Cahaya Ilmu Bangsa
Vol 5 No 5 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.9765/Krepa.V218.3784

Menurut Zastrow dalam Adi (2005: 76) bahwa ada 3 komponen yang perlu dipertimbangkan dan dielaborasi dalam mengembangkan profesi praktisi di bidang pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial. Ketiga komponen dasar tersebut adalah:

1.Pengetahuan (knowledge) merupakan pemahaman teoritis ataupun praktis yang terkait dengan cabang-cabang ilmu pengetahuan, belajar dan seni yang melibatkan penelitian maupun praktek serta pengembangan keterampilan.

2.Keterampilan (skill) keterampilan merupakan kemampuan, keahlian atau kemahiran yang diperoleh dari praktek dan pengetahuan.

3.Nilai (value) dapat menentukan sikap dan tindakan seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Komponen kesejahteraan sosial diatas menjelaskan bahwa dalam prakteknya para praktisi pekerja sosial dalam praktek pertolongannya menggunakan ketiga komponen tersebut.

Disamping nilai-nilai diatas ada beberapa metode pekerjaan sosial yang harus diperhatikan dalam praktek pekerja sosial.

Berikut tahapan yang dilakukan dalam penyelesaian masalah klien tersebut.

1. Engagement, Intake, Contract : Pada tahap ini melakukan pendekatan terhadap PPKS dengan menjelaskan maksud dan tujuan. Melakukan kesepakatan kontrak antara pekerja sosial dengan klien. Praktikan juga menjelaskan kepada klien tentang apa itu pekerjaan sosial. Selain itu, Praktikan memastikan bahwa PPKS bersedia menerima bantuan dalam menyelesaikan masalahnya.

2. Assessment : Tahap ini berisikan tahap penyelesaian masalah dengan adanya informasi dari klien mengenai penyebab dari adanya permasalahan dan juga hal yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan ataupun mengatasi masalah yang dihadapi klien. Dari hasil wawancara dengan PPKS. Praktikan mengatahui bahwa PPKS setelah tamat SMP putus sekolah tidak melanjutkan SMA dikarenakan terpengaruh dengan pergaulan bebas, sehingga ia memutuskan untuk pergi dari rumah dan tinggal bersama dengan teman-temannya dijalan.

3. Planning/ Perencanaan : Intervensi sosial adalah upaya perubahan terencana terhadap individu, kelompok, maupun komunitas. Dikatakan ‘perubahan terencana’ agar upaya bantuan yang diberikan dapat dievaluasi dan diukur keberhasilannya. Intervensi sosial juga dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk memperbaiki keberfungsian sosial dari kelompok sasaran perubahan , dalam hal ini, individu, keluarga , dan kelompok. Strategi yang dijalankan adalah dengan mencari keterampilan-keterampilan yang disukai dan digemari oleh PPKS (Klien) serta menulusuri keluarga PPKS.

4. Intervensi : Intervensi pekerjaan sosial adalah keterlibatan pekerja sosial dengan individu, keluarga, kelompok, atau komunitas yang mereka bantu. Rencana intervensi dalam pekerjaan sosial akan dirumuskan berdasarkan penilaian klien untuk membantu memastikan peluang keberhasilan terbaik. Dengan menggunakan strategi intervensi dalam pekerjaan sosial, pekerja sosial akan melakukan intervensi dalam kehidupan klien untuk membantu mereka memecahkan masalah, keluar dari situasi negatif, dan mengembangkan sistem pendukung agar masalah tersebut tidak terulang kembali.

Tahap ini merupakan pelaksaan program awal yaitu dengan memenuhi kebutuhan sandang dan pangan, memotivasi klien agar mengikuti kegiatan keagaamaan nasrani disetiap hari jumat, serta kegiatan olahraga atau senam di setiap hari jumat agar klien fisiknya sehat selama berada di Rumah Perlindungan Sosial, dan melakukan pendampingan rutin setiap seminggu

sekali dengan klien. Disamping itu praktikan mencoba mencari tau apa yang digemari ppks, sambil menelusuri keluarga klien tersebut tinggal dimana, agar klien bisa dijemput dengan keluarganya.
5. Evaluasi : Dalam tahap ini, Praktikan melakukan monitoring kegiatan yaitu hasil dari pada intervensi yang sudah dilakukan dengan PPKS. Apakah intervensi yang dilakukan berhasil atau malah sebaliknya. Di tahap ini, Praktikan melihat adanya perubahan pada PPKS yang cukup signifikan, dimana pada tahap ini klien mulai percaya diri dan ingin berubah dan kembali dengan keluarganya.
6. Terminasi : Tahap ini adalah tahap penghentian proses pemberian bantuan pekerja sosial dengan klien agar tidak menimbulkan ketergantungan klien. Praktikan menghentikan proses bantuan kepada klien karena rasa percaya diri sudah meningkatdan klien di kembalikan ke keluarganya.

KESIMPULAN

Rumah Perlindungan Sosial (RPS) Kota Medan memainkan peran strategis sebagai instrumen kebijakan publik dalam merespons berbagai permasalahan sosial di wilayah perkotaan. Melalui layanan rehabilitasi sosial, konseling, pelatihan keterampilan, serta kerja sama lintas sektor, RPS tidak hanya memberikan perlindungan sementara, tetapi juga mendukung proses pemulihan dan reintegrasi sosial kelompok rentan seperti tunawisma, korban kekerasan, lansia terlantar, dan eks ODGJ. Implementasi RPS juga selaras dengan mandat hukum nasional dan daerah, serta menjadi bagian dari pelaksanaan RPJMD Kota Medan, mencerminkan komitmen pemerintah kota dalam menanggulangi ketimpangan sosial secara sistemik dan berkelanjutan. Studi kasus terhadap PPKS menunjukkan bahwa pendekatan pekerja sosial berbasis asesmen holistik—seperti Social Life Road, genogram, ecomap, dan roadmap—mampu meningkatkan kepercayaan diri klien dan mendorong perubahan perilaku positif yang berorientasi pada pemulihan fungsi sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Benediktus, R., & Meritus, D. (2022). Cause and Impact Analysis of Homeless and Beggars: A Study of Urban Poverty and Social Stigma in Medan. *Jurnal Sosial, Sains, Terapan dan Riset (Sosateris)*. https://doi.org/10.35335/brmrsg05.

Humaizi, H., Sibero, B., Kusmanto, H., & Ridho, H. (2024). Impact of Global Crisis on Social and Economic Inequality in Medan City: A Strategic Approach to Community Empowerment and Multisector Collaboration. *Research Journal in Advanced Humanities*. https://doi.org/10.58256/ezhqb222.

Siregar, S., Ritonga, F., & Ginting, B. (2024). Upaya Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis yang dilakukan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Medan melalui Pengadaan Rumah Singgah. *Jurnal Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*. https://doi.org/10.55606/jppmi.v3i2.1281.

Sudiarti, S., & Hasibuan, S. (2022). The Role of Social Services in Poverty Reduction in Medan City. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Review*. https://doi.org/10.53697/emba.v2i1.566.

Tampubolon, K., Elazhari, E., Undang, G., & Pin, P. (2024). The Influence of Decentralization Policy and Family Hope Program on Social Welfare in Urban Areas Through Social Assistance. *Khazanah Sosial*. https://doi.org/10.15575/ks.v6i3.40882.

Tarigan, A., Samsura, D., Sagala, S., & Pencawan, A. (2017). Medan City: Development and governance under the decentralisation era. *Cities*, 71, 135-146. https://doi.org/10.1016/J.CITIES.2017.07.002.